
Analisis kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di kabupaten kotawaringin barat

Neya Arifah¹, Sunaryo Neneng², Karmen Marpaung³

^{1,2,3} Universitas Palangka Raya

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received

Revised

Accepted

Keywords:

independence, economic growth, poverty

Kata Kunci:

kemandirian, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of financial independence on economic growth and poverty levels of local communities in Kotawaringin Barat Regency. The data used in this study is secondary time series data for 2009 – 2018 which was analyzed using a path analysis model. The results showed that the Financial Independence of Kotawaringin Barat Regency was in the low category. The level of financial independence directly has a positive effect on economic growth and has a negative effect on the poverty level. Indirectly, the level of financial independence has a negative influence on the poverty level of the people of West Kotawaringin Regency. The role of the West Kotawaringin local government is needed to encourage an increase in regional income and the use of government revenue in the form of spending more focused on poverty alleviation programs based on local wisdom.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series tahun 2009 – 2018 dianalisis menggunakan model analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada kategori rendah. Kemandirian keuangan secara langsung mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Secara tidak langsung kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Perlu peran pemerintah daerah Kotawaringin Barat untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dan penggunaan dari pendapatan pemerintah berupa belanja lebih difokuskan pada program pengentasan kemiskinan yang berbasis kearifan lokal.

©2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

*Corresponding author :

Address : Palangka Raya, Indonesia

E-mail :

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di daerah tersebut. Keberhasilan pembangunan ekonomi sering diukur berdasarkan laju pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good govermance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiscal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak.

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah merupakan Daerah Kabupaten yang otonom. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima (5) tahun terakhir setiap tahun mengalami peningkatan antara 2,92% hingga 26,06%. Laju pertumbuhan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung meningkat walaupun pada tahun 2016 menurun jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Disisi lain tingkat kemiskinan masyarakat setiap tahun cenderung semakin menurun. Adanya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan kemandirian keuangan daerah ini setiap tahun akan mengalami peningkatan dan

selanjutnya akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Penelitian tentang pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Belum pernah dilakukan.

Kemandirian Keuangan

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diukur dengan pendekatan Angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). RKKD menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana lokasi umum (DAU) dan Dana alokasi khusus (DAK), Dana darurat dan pinjaman. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung RKKD adalah sebagai berikut (Abdul Halim 2007) :

$$RKKD = \frac{PAD}{Tr. Pem. Pusat + Provinsi dan Pinjaman} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah semakin tinggi mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Kemampuan keuangan atau tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) klasifikasi, sebagai mana dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Klasifikasi Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)
---------------------------	-----------------

	0% - 10,00%
Sangat Rendah	10,01% - 20,00%
Sedang	20,01% - 30,00%
Cukup Baik	30,01% - 40,00%
Sangat Baik	40,01 - 50,00%
	> 50%

Sumber : Tim Litbang Daepdagri-Fisipol UGM (Dalam Cheris, dkk 2016).

Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kenaikan output dalam jangka panjang dan bagaimana interaksi antar faktor tersebut sehingga terjadi pertumbuhan (Budiono, 1982). Untuk menjelaskan output per kapita, teori pertumbuhan harus mencakup teori tentang GDP total dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sedangkan perspektif jangka panjang menjelaskan bahwa pertumbuhan atau minimal kecenderungan pertumbuhan terjadi dalam waktu panjang.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Tingkat PDRB yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi. Putri (2014) melakukan pengujian terkait pengaruh PDRB terhadap kemandirian daerah. Apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat tinggi.

Kemiskinan

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan adalah hubungan yang kompleks dan kontroversional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah prakondisi bagi pengurangan kemiskinan. Namun ini tidaklah cukup, berbagai studi telah mencoba menganalisis hubungan antara

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang secara metodologi dapat dikelompokkan menjadi dua (Berardi dan Marzo, 2015). Kelompok pertama berfokus pada hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan. Penelitian ini merupakan bentuk dari hubungan kemiskinan dengan perekonomian secara mikro dimana pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan menjadi indikator dari perekonomian mikro, sedangkan kelompok kedua berfokus pada elastisitas kemiskinan terhadap PDB yang merupakan indikator dari perekonomian secara makro. Dalam hal ini, struktur ekonomi adalah elemen penting yang menentukan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Dalam penelitian ini penulis merujuk pada jenis penelitian kedua yaitu berfokus pada pengaruh struktur PDB terhadap tingkat kemiskinan. Hubungan pertumbuhan ekonomi pada level sektoral dengan kemiskinan telah diteliti antara lain oleh Siregar dan Wahyuniarti (2007), Sobia dkk (2013), Zaman dkk (2014), Berardi dan Marzo (2015), dan Hasan dan Quibria (2002). Siregar dan Wahyuniarti (2007) menemukan bahwa sumbangan sektor industri dan pertanian dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Lebih jauh ditemukan pula bahwa dampak sumbangan sektor industri terhadap penurunan jumlah kemiskinan lebih besar 2,6 kali daripada dampak sumbangan sektor pertanian yang mengindikasikan bahwa industrialisasi yang dilaksanakan secara tepat dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan serta relatif besar pengaruhnya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Rose, dkk (2013) menemukan bahwa kemiskinan di Pakistan lebih dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan di sektor industri, daripada pertumbuhan di sektor pertanian. Hal ini terjadi karena kemampuan sektor industri

untuk menyerap tenaga kerja yang tidak terampil. Sektor pertanian sebetulnya masih memberikan manfaat bagi pengurangan kemiskinan, namun pengaruhnya tidak lagi signifikan. Sementara itu, pertumbuhan sektor jasa justru menyebabkan peningkatan kemiskinan oleh karena sektor ini tidak menyerap tenaga kerja yang tidak terampil. Berardi dan Marzo (2015) membuktikan bahwa sektor yang lebih mempengaruhi kemiskinan di Afrika adalah sektor yang berpihak pada potensi masyarakat miskin (*pro-poor potential*). Contoh dari sektor yang dimaksud adalah sektor pertanian dimana peningkatan pada sektor pertanian akan meningkatkan sektor-sektor barang dan jasa sehingga meningkatkan permintaan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila pertumbuhan terkonsentrasi di sektor-sektor yang tidak berpihak pada potensi masyarakat miskin, maka perlu dikompensasi dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat terdistribusi. Hasan dan Quibria (2002) menemukan hubungan kuat antara pertumbuhan dengan kemiskinan di Asia bagian Barat. Hubungan ini terutama dikendalikan oleh pertumbuhan sektor industri. Hal ini berlawanan dengan yang terjadi di Amerika Latin, Asia bagian Selatan, dan Sub-Saharan Africa, di mana sektor pertanian adalah sektor yang paling kuat peranannya dalam pengurangan kemiskinan. Upaya-upaya memperbaiki kebijakan dan ke-lembagaan sangat dibutuhkan agar dapat memanfaatkan keunggulan komparatif di industri padat karya agar dapat menekan kemiskinan. Zaman, dkk (2014) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen anti kemiskinan yang paling dominan. Penurunan kemiskinan yang cepat di Pakistan disebabkan oleh tingginya pertumbuhan sektor-sektor penghasil komoditas dan berkurangnya ketimpangan di perkotaan. Hal tersebut ditemukan melalui perhitungan

menggunakan *pro-poor growth index* di tingkat sektoral. dalam perhitungan memang ditemukan adanya sektor yang merupakan sektor anti kemiskinan dan ada juga yang tidak, namun secara menyeluruh *pro-poor growth index* menunjukkan secara keseluruhan pertumbuhan sektoral memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif lebih menggunakan data berupa angka-angka dalam menganalisis fakta – fakta yang ditemukan untuk membuktikan hipotesis. Kabupaten ini merupakan kabupaten induk setelah mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten. Jenis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Dilihat dari sumbernya, data yang digunakan adalah merupakan data sekunder berderet waktu (*time series*) periode tahun 2009-2018.

Menganalisis Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dianalisis secara kuantitatif dengan metode statisik. Model analisis yang digunakan adalah model persamaan analisis jalur (*Path Analysis*).

Hasil Penelitian

Hasil olah data kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009-2018 yang setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2009 hasil rasionya sebesar 6,82 kategori sangat kurang/Instruktif. Pada tahun 2010 hasil rasionya mengalami kenaikan menjadi 8,38 termasuk kategori sangat kurang/Instruktif. Pada tahun 2011-2012 hasil rasio menunjukkan dalam kategori sangat kurang/Instruktif dengan skala intervalnya di persentase 0,00-10,00%. Pada tahun 2013 hasil rasionya mengalami kenaikan menjadi 23,89 termasuk kategori sedang/Instruktif. Pada

tahun 2014-2015 hasil rasio mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori kurang/Instruktif. Pada tahun 2016-2018 hasil rasio kembali mengalami kenaikan dan termasuk dalam kategori kurang/Instruktif. Secara rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009-2018 yaitu sebesar 15,35% termasuk kategori kurang/Instruktif. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat. Angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) periode tahun 2009 hingga 2018 mengalami peningkatan dari 6,82 % menjadi 23,89 %, sementara pada periode yang sama laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan dari 6,41% menjadi 7,55%, dan tingkat kemiskinan masyarakat menurun dari 6,87% menjadi 5,44%. Pada periode ini ada kecenderungan perubahan angka RKKD dengan laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan perubahan yang searah, sementara perubahan RKKD dengan tingkat kemiskinan cenderung menunjukkan hubungan yang berlawanan arah.

Angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah periode selanjutnya 2013-2015 mengalami penurunan dari 23,89% menjadi 15,61%, sementara disisi lain laju pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami penurunan dari 7,55% menjadi 7,32% dan tingkat kemiskinan masyarakat menurun dari 5,44% menjadi 4,52%. Selama periode ini perubahan RKKD, perubahan laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan sama-sama mengalami penuruna atau terdapat pola perubahan yang searah.

Selanjutnya angka RKKD pada periode tahun 2015-2019 cenderung meningkat dari 5,61%, menjadi 8,93%, sementara disisi lain laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 7,32% menjadi 6,47% dan tingkat kemiskinan

masyarakat juga menurun dari 5,50% menjadi 4,27%. Pada periode ini perubahan angka RKKD dengan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat terdapat perubahan yang tidak searah. Selama periode tahun 2009-2019 bagaimanakah pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah (RKKD) baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Koefisien regresi yang ditemukan sebesar 0,018 dengan tingkat signifikansi 0,508. Karena $0,508 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh langsung yang signifikan dari Kemandirian Keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kesimpulan pengujian secara parsial ini juga didukung dengan nilai R^2 yang sangat rendah ($R^2 = 0,050$) dan nilai $F = 0,476$.

Variasi laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan oleh Kemandirian Keuangan Daerah secara langsung hanya sebesar 5,0% ($R^2 = 0,050$), sisanya sebesar 95% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ikut dianalisis atau yang dianggap konstan, antara lain : Investasi pemerintah, Investasi Suasta, Kesempatan Kerja, Teknologi, dan faktor yang lain. Hal ini dapat dilihat dari nilai konstanta 6,464 dan signifikan hingga 100%. Artinya faktor-faktor lain yang dianggap konstan selama periode waktu penelitian ini, mempunyai pengaruh yang signifikan hingga 100%.

Koefisien regresi yang ditemukan sebesar -3,660 dengan tingkat signifikansi 0,508. Karena $0,00508 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh langsung yang signifikan dari Kemandirian Keuangan Daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Setiap terjadi peningkatan angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1% secara langsung akan menurunkan tingkat

kemiskinan sebesar 3,66% (Ceteris paribus).

Kesimpulan pengujian secara parsial ini juga didukung dengan nilai $R^2 = 0,598$ dan nilai $F = 13,396$. Faktor kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama dengan faktor-faktor lain yang dianggap konstan mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Besarnya perubahan tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh perubahan angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebesar 59,80% ($R^2 = 0,598$) sisanya sebesar 40,20% dipengaruhi oleh perubahan-perubahan faktor lain yang tidak ikut dianalisis.

Nilai konstanta diperoleh sebesar 7,407 dan signifikan hingga tingkat keyakinan 100%. Artinya faktor-faktor lain yang dianggap konstan selama periode waktu penelitian ini, mempunyai pengaruh yang signifikan hingga 100%. Hasil analisis persamaan struktur diperoleh seperti pada Tabel di bawah ini. Hasil analisis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Konstanta (α_0) = 4,532, nilai $t_{hitung} = 1,598$ dan tingkat signifikansinya = 0,149. Ini berarti bahwa nilai konstanta yang ditemukan sebesar 4,532 berbeda nyata dengan nol hingga tingkat keyakinan 85,00%. Faktor-faktor yang dianggap konstan selama periode waktu penelitian ini, mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan hingga tingkat keyakinan 85,00% sebesar 4,552%.

Koefisien regresi $P_2 = -0,134$, nilai $t_{hitung} = -3,812$ dan tingkat signifikansinya = 0,005. Ini berarti bahwa koefisien regresi $P_2 = -0,134$ berbeda nyata dengan nol. Hingga tingkat keyakinan 99,5%, bahwa kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Koefisien regresi $P_3 = -0,445$, nilai $t_{hitung} = -1,034$ dan tingkat signifikansinya = 0,071. Ini berarti bahwa koefisien regresi $P_3 = -0,445$ berbeda nyata dengan nol. Hingga tingkat keyakinan 92,90%, bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai pengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

KESIMPULAN

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada kategori rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama tahun 2009-2018. Tingkat kemandirian keuangan daerah secara langsung mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah sedangkan secara langsung mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar. Tingkat kemandirian keuangan daerah secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat kategori kemandirian keuangan Kabupaten Kotawaringin barat yang termasuk kategori rendah, maka pemerintah daerah perlu tegas memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggungjawab, meningkatkan koordinasi, dan menagih serta menyeter kekurangan penerimaan kas daerah sesuai dengan ketentuan. Selain itu pemerintah daerah diharapkan dapat memedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, dan lebih optimal dalam melakukan perencanaan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat; Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan yang baik terhadap implementasi kebijakan pajak, agar iklim investasi dan stabilitas keuangan Pemerintah Daerah dapat bersama-sama berkembang dengan baik yang pada akhirnya terjadi kesejahteraan masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)

- dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi IV, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. ASP-05
- Agustina, Oesi. 2013. Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011) Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Agus Wahyudin. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012
- Ahmad Yani. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers
- Andri Haryanto. 2014. Analisis Efektivitas Kemandirian dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Medan
- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta
- Dwiranda. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. Universitas Udayana
- Ika Etika Nur Handayani. 2012. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mamesah, D.J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nataluddin. 2001. Potensi Dana Perimbangan Daerah Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-YKPN
- Octovido Irsandy. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu Tahun (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah kota Batu tahun 2009-2013). Jurnal Berkala Administrasi Bisnis, Volume 15 No.1
- Ramadhani, Febby Randria. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, 2016
- Riris Dewi Anggriani. 2015. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tanggerang Tahun Anggaran 2010-2014. Tanggerang
- Saputra, Dori. 2014. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal. Universitas Negeri Padang
- Tarnoto. 2018. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus: Provinsi Banten tahun 2011-2015. Banten
- Todaro, Michae, P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ketujuh diterjemahkan oleh Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta